



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN
DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI, DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN
ESDM RI, DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KEMENTERIAN LHK RI,
DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN B3 KEMENTERIAN LHK RI,
DAN RDPU DENGAN 10 PERUSAHAAN MIGAS DAN MINERBA YANG
BERMASALAH DENGAN LIMBAH**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK RI, dan RDPU dengan 10 perusahaan Migas dan Minerba yang bermasalah dengan limbah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 21 Januari 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Muhammad Nasir (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. Demokrat)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Permasalahan lingkungan di Sektor Migas dan Minerba 2. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang serta implementasi AMDAL 3. Lain-lain

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Permasalahan lingkungan di Sektor Migas dan Minerba
 - b. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang serta implementasi AMDAL
 - c. Lain-lain

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

Komisi VII DPR RI sepakat untuk menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba dan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK RI, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 10 perusahaan Migas dan Minerba, dan akan diagendakan kembali yang waktunya ditentukan kemudian, serta meminta data daftar perusahaan yang belum dan sudah menyampaikan dana jaminan reklamasi pasca tambang termasuk rencana, penetapan, penempatan, pelaksanaan dan laporan pelaksanaannya serta dokumen hasil penilaian proper tahun 2018 untuk disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 28 Januari 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.30 WIB

Jakarta, 21 Januari 2019

KETUA RAPAT,


MUHAMMAD NASIR